JEMBA
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi
Vol.2, No.6, Nopember 2023

STRATEGI INOVASI BIDPROPAM POLDA BENGKULU DALAM IMPLEMENTASI APLIKASI PENGADUAN MASYARAKAT PRESISI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI

Oleh
Kuswahyudi Tresnadi[1*], Zulkifli[2], Agustinus Miranda W[3]
[1,2,3]Magister Manajemen, Universitas Pancasila
Email: [1]Kuswahyuditresnadishsik@gmail.com

Article History:
Received: 24-10-2023
Revised: 02-11-2023
Accepted: 20-11-2023

Keywords:
Strategi Inovasi, Kinerja Organisasi, Pengawasan, Propam Polda

Abstract: *Penelitian ini dilakukan adalah untuk merumuskan strategi inovasi yang tepat dalam optimalisasi implementasi pelayanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Propam Presisi di Bidpropam Polda Bengkulu, dan untuk mengetahui factor apa saja yang mempengaruhinya dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (campuran). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuisioner, teknik analisis data menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) yang diolah dengan Smart PLS 4.0 untuk analisis kuantitatif, sedangkan untuk analisis kualitatif menggunakan SWOT, IFE & EFEdan QSPM. Hasil penelitian kuantitatif membuktikan bahwa variabel Teknolgi Digital, Budaya Adaptif, Kapabilitas Organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inovasi dan kinerja organisasi, namun variable kepemimpinan adaptif berpengaruh terhadap variable inovasi dan variable kinerja organisasi. Selanjutnya hasil analisis strategi melalui tahapan input stage dengan metode IFE & EFE matching stage dengan SWOT dan QSPM dengan hasil strategi yang harus dilakukan dalam rangka optimalisasi implementasi sistem pengaduan masyarakat Propam Presisi di Bidpropam Polda Bengkulu dengan : (1) lakukan transformasi organisasi yang adaptif, (2) Lakukan pengembangan Kompetensi SDM, dan (3) Peningkatan sarana-prasarana dan media pendukung implementasi sistem*

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat (4). Selanjutnya dalam pelaksanaannya, Polri berpegang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum. Besarnya tugas dan tanggungjawab yang diemban anggota Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya dituntut dapat berjalan secara professional dan proforsional sehingga perlunya langkah pengawasan yang optimal. Pengawasan mempunyai arti penting bagi

setiap organisasi dimana hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efesien) dan berhasil guna efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Daulay (2017) pengawasan adalah usaha sistemik untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki organisasi telah dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Data pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM RI periode Januari-September 2021 terdapat sebanyak 3.758 berkas yang dikonversi menjadi 2.331 kasus. dengan pihak yang banyak diadukan ialah Polri, korporasi, dan Pemda. Banyaknya aduan terkait kinerja Polri yang diterima oleh Komnas HAM RI menyangkut beberapa hal, yakni ketidakprofesionalan/ ketidaksesuaian prosedur oleh Kepolisian. Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM RI Amiruddin dalam Bincang HAM dan Demokrasi: "Menakar Arah Reformasi Polri" yang diselenggarakan secara daring oleh Imparsial, Senin (1/11/2021) mengatakan bahwa "Ini perlu dipahami pihak kepolisian, sebagai garda terdepan dalam pelayanan pemerintah, kinerja kepolisian hanya bisa maksimal jika kepercayaan dari masyarakat terbangun dengan baik." Kemudian dikutip dari artikel ombudsman.go.id bahwa sejumlah lembaga eksternal maupun independen telah memberikan banyak koreksi, masukan, dan evaluasi menyangkut kinerja Polri. Catatan Ombudsman RI di tahun 2019, pernah merekomendasikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) supaya mengevaluasi pelayanan berupa penyampaian informasi perkembangan penyidikan tindak pidana yang sering terjadi undue delay (penundaan berlarut).

Hasil observasi awal yang dilakukan di lingkungan Bidpropam Polda Bengkulu terlihat aktivitas Aplikasi Propam Presisi dari sejak diberlakukannya pada tahun 2021 hingga tahun 2022 tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan masih terdapat lebih banyak pengaduan masyarakat tidak terkait dengan pengawasan dan tidak terbukti, sementara aplikasi Pengaduan masyarakat Propam Presisi sendiri dibuat dengan harapan dapat meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pengawasan secara internal terhadap kinerja di lingkungan Polri hingga ketingkat yang paling rendah dan jauh, sehingga Bidpropam Polda Bengkulu perlu melakukan inovasi dalam mengoptimalkan implementasi Aplikasi Pengaduan masyarakat Presisi.

Kemudian Pra-penelitian yang dilakukan Peneliti pada bulan Februari hingga Maret 2023, melalui wawancara singkat dengan beberapa informan dari personel Bidpropam dan anggota Polri lainnya di Polda Bengkulu diperoleh informasi bahwa rendahnya pelaporan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Propam Presisi lebih dikarenakan belum masifnya sosialisasi kepada masyarakat maupun diinternal Polri Polda Bengkulu dan jajarannya serta masih kesulitan dalam melakukan akses, tidak berani melaporkan pelanggaran anggota Polri karena saat membuat pengaduan masyarakat harus menyertakan data diri pelapor yang bisa dipertanggung jawabkan, selain belum mengetahuinya manfaat dari aplikasi Propam Presisi dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja anggota Polri khususnya di Polda Bengkulu dan jajarannya hingga Polsek dan Subsektor dalam optimalisasi pelayanannya kepada masyarakat secara profesional dan proforsional karena berbagai unsur juga di Bidpropam Polda Bengkulu belum secara penuh memahami secara teknis pengimplementasian aplikasi selain karena keterbatasan kemampuan SDM terkait pemanfaatan teknologi digital dalam bidang pelayanan kemasyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Organisasi dan/atau Stakeholder mempunyai peran penting dalam upaya melakukan berbagai inovasi dan siap menghadapi perubahan budaya dan keterbukaan diera revolusi industry

4.0 saat ini agar implementasi aplikasi Pengaduan masyarakat Presisi di Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Bengkulu dapat terlaksana secara optimal sesuai harapan kedepan dan mampu meningkatkan kinerja organisasi.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah mixed methods. Mixed methods atau sering disebut dengan penelitian campuran ini merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitiatif dengan penelitian kuantitatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih objektif, komprehensif, valid dan reliabel. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research yaitu dengan meneliti langsung pada objek penelitian. Objek penelitian dilaksanakan di Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Bengkulu dengan responden utama adalah para pejabat dan pelaksana utama pelayaman pengaduan masyarakat serta seluruh anggota Bidpropam Polda Bengkulu lainnya yang juga memiliki peran mendukung optimalisasinya implementasi sistem Pengaduan masyarakat Propam Presisi di Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Bengkulu. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara dimana data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder.. Hal ini menggunakan teknik penelitian survey tertulis yang disusun kedalam bentuk kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian kepada sampel dari suatu populasi. Peneliti menggunakan skala Ordinal. Dengan menggunakan skala Ordinal, yaitu skala yang memberikan skor 1-5 untuk menegetahui derajat responden terhadap serangkaian pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dimana skala tersebut mempunyai susunan dan skor untuk masing-masing jawaban dalam kuesioner

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif statistik yang dijelaskan adalah deskripsi responden dan data persepsi menurut responden. Deskripsi statistik proses pengambilan data digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian dan profil responden yang melakukan pengisian kuisioner. Sedangkan deskripsi statistik data persepsi responden digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata persepsi responden pada setiap variabel. Teknis pelaksanaan tugas masing-masing kemudian di atur dalam beberapa peraturan Kapolri dan peraturan Kepala Divisi Propam Polri. Sementara terkait teknis pelaksanaan tugas pelayanan pengaduan masyarakat (dumas) Presisi dan Propam Presisi belum ada SOP tersendiri dan masih mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri. Untuk pelaksanaan tugas penanganan pengaduan masyarakat (dumas) Presisi dan Propam Presisi terkait dengan pelanggaran disiplin atau kode etik Polri di lingkungan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Bengkulu dilaksanakan atau diterima langsung oleh Subbagian Pelayanan Pengaduan yang kemudian dilakukan ditindaklanjuti dengan pencatatan, penelaahan, dan pengkajian untuk diberikan saran pendapat Kepada Bidang Profesi dan Pengamanan Polda. Gambar tata cara penanganan pengaduan masyarakat, sebagai berikut :

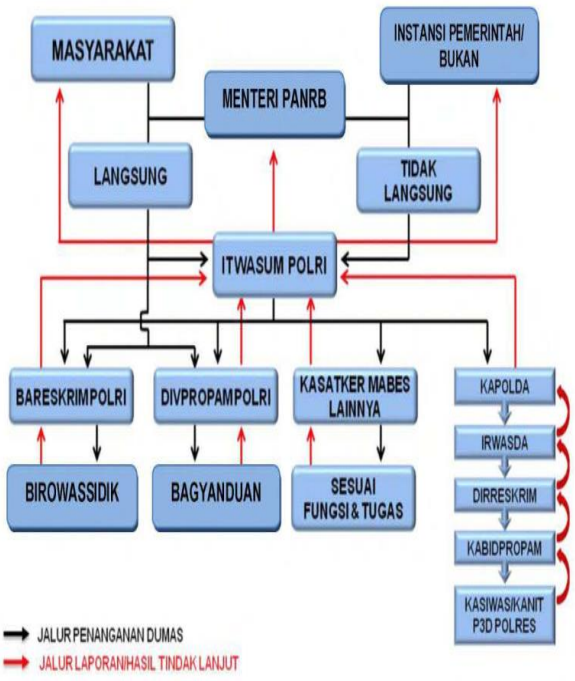

Gambar 1. Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan gambar diatas, dijelaskan bahwa pengaduan masyarakat yang diterima diterima oleh Subbagian Pelayanan Pengaduan Bidpropam dan yang bukan merupakan kewenangannya akan dilimpahkan kepada institusi/ fungsi terkait seperti ke Direktorat Reserse Kriminal Umum/ Khusus/ Narkoba Polda atau kepada Kepala Kepolisian Resor, sesuai fungsi berkaitan dan keberadaan permasalahan yang diadukan, begitu pula sebaliknya laporan pengaduan masyarakat yang diterima Bidpropam Polda dari Inspektur Pengawas Daerah dan Direktur Reserse Kriminal Umum/ Khusus/ Narkoba Polda maupun Polres selanjutnya akan didistribusikan kepada fungsi dibawahnya untuk ditindak lanjuti dan pelaporan pengaduan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Bidang Profesi dan Pengamanan Polda dan semua hasil tindak lanjut hasil penelitian, penyelidikan dan penyidikan akan diberitahukan perkembangannya kepada pelapor.

Analisis karakteristik responden dilakukan untuk mengetahui deskripsi latar belakang responden. Pendeskripsian karakteristik responden bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang diisikan pada kuisioner. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah responden yang bekerja di Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Bengkulu dan jajarannya pada tahun 2023 yang berjumlah 90 orang. Adapun karakteristik responden yang dijadikan sampel meliputi Jenis kelamin, lama dinas, dan pendidikan dengan frekuensi dan persentase. Berdasarkan uji tersebut diketahui bahwa personel Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Bengkulu yang terkait dengan aktifitas pada aplikasi pengaduan masyarakat Presisi dan Propam Presisi Polda Bengkulu mulai dari penerimaan laporan hingga tindak lanjut dan penyelesaian perkaranya dengan komposisi yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 83 orang (90.3%), sedangkan untuk perempuan sebanyak 9 orang (9,8%). Dengan lama dinas sebagian besar sudah berdinas di Polri lebih dari 20 tahun dengan jumlah sebanyak 42 orang (45.7%), selanjutnya yang berdinas antara 10-20 tahun sebanyak 42 orang (28,3%), sedangkan yang berdinas dibawah 10 tahun atau lebih dari 5 tahun sebanyak 12 orang (13%) dan kurang dari 5 tahun berdinas sebanyak 12 orang (13%). Dan pendidikan umum

yang dimiliki sebagian besar adalah setingkat SMA yaitu jumlah sebanyak 45 orang (48.9%), selanjutnya untuk pendidikan setingkat Sarjana (S1) sebanyak 41 orang (44,6%) dan pendidikan setingkat Pascasarjana (S2) sebanyak 6 orang (6,5%).

Penelitian terhadap variabel Teknologi Digital diukur dengan 15 (lima belas) pernyataan dengan aspek penelitian terhadap dimensi Strategi dan Budaya, Manusia (Staff dan Keterlibatan Konsumen/ Publik), Proses dan Inovasi, Teknologi serta Data and Analytics. Berdasarkan hasil keseluruhan tanggapan responden untuk variabel teknologi digital dalam kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 4,82. Hal ini menggambarkan bahwa di Bidpropam Polda Bengkulu implementasi sistem teknologi digital secara umum dalam aktifitasnya sehari-hari sudah berjalan dengan baik dan responden meyakini bahwa implementasi sistem aplikasi pengaduan masyarakat presisi (Dumas Presisi dan Propam Presisi) mampu menjadi strategi/ titik awal terciptanya pelayanan melalui sistem digitalisasi dalam optimalisasi pengaduan masyarakat, hal ini terlihat dari nilai rata-rata indikator paling tinggi pada dimensi strategi dan budaya yaitu 4,89 dan kemudian disusul dengan nilai rata-rata 4,86 terkait kesiapan personel Bidpropam Polda Bengkulu mendukung proses penyempurnaan implementasi aplikasi Propam Presisi sesuai dengan kemampuan dengan pengetahuan yang dimiliki agar implementasinya berjalan secara optimal sehingga kedepan dapat menjadi aplikasi yang mampu menganalisis data penilaian kinerja anggota Polri dan organisasi secara umum serta dapat menjadi acuan/ dasar pimpinan dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, perlu menjadi perhatian organisasi juga bahwa dukungan fasilitas teknologi digital di Bidpropam Polda Bengkulu harus memadai, hal ini terlihat pada indikator dukungan fasilitas teknologi mendapat penilaian rata-rata terendah dari responden yaitu 4,62 (kategori paling rendah).

Penelitian terhadap variabel Inovasi diukur dengan 12 (dua belas) pernyataan dengan aspek penelitian terhadap dimensi Eksplorasi Peluang (Opportunity Exploration), Mengeluarkan Ide (Idea Generation), Memperjuangkan (Championing) dan Aplikasi (Application). Berdasarkan hasil keseluruhan tanggapan responden untuk variabel strategi inovasi dalam kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 4,82. Hal ini menggambarkan bahwa Bidpropam Polda Bengkulu memiliki kemampuan untuk beri novasi dengan melakukan hal-hal baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output sehingga berhasil menciptakan perubahan besar atau perubahan drastis dalam hubungan antara nilai guna atau nilai manfaat dari implementasi sistem pengaduan masyarakat presisi di Polda Bengkulu dan responden meyakini bahwa perlu disusun strategi dan langkah-langkah yang tepat dalam optimalisasi pelayanan pengaduan dan tindak lanjut guna optimalisasi implementasi Dumas Presisi dan Propam Presisi.

Selanjutnya Bidpropam Polda Bengkulu akan terus berupaya melakukan pengembangan terus-menerus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi guna mewujudkan kemudahan dalam pelayanan pengaduan masyarakat, hal ini terlihat dari nilai rata-rata indikator paling tinggi yaitu 4,86. Nilai tertinggi berikutnya pada indikator pengaplikasian dengan nilai rata-rata 4,85 dimana hal ini menggambarkan bahwa personel Bidpropam Polda Bengkulu siap dan mampu serta menilai perlu sosialisasi secara masif terkait implementasi sistem pengaduan masyarakat dan mengevaluasi berdasarkan saran dan masukan dari publik. Namun demikian, pada indikator eksplorasi peluang (opportunity exploration) nilai rata-rata dalam kategori paling rendah yaitu 4,74 dimana semangat seperti yang digambarkan diatas, perlu kiranya dilakukan langkah-langkah atau cara-cara lain yang terpadu guna optimalisasi implementasi dalam kondisi masih banyaknya keterbatasan pada aplikasi pengaduan masyarakat Propam Presisi di Polda Bengkulu.

Pengujian validitas dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 92 orang dan kemudian

digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan Smart PLS4 dapat dilihat dari tabel 4.30 dibawah ini:

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Dimensi	Indikator	*Loading factor*	Ket.
Teknologi digital	Strategi dan Budaya	TEK.1	0.903	Valid
		TEK.2	0.845	Valid
		TEK.3	0.760	Valid
	Manusia (Staff dan Keterlibatan Konsumen/ Publik)	TEK.4	0.771	Valid
		TEK.5	0.917	Valid
		TEK.6	0.795	Valid
	Proses dan Inovasi	TEK.7	0.874	Valid
		TEK.8	0.757	Valid
Kapabilitas organisasi	*Top-down, first*	KAP.1	0.838	Valid
		KAP.2	0.777	Valid
		KAP.3	0.837	Valid
	Communicate	KAP.4	0.918	Valid
		KAP.5	0.936	Valid
		KAP.6	0.838	Valid
	Drive and Reinforce The Cultural Change	KAP.7	0.920	Valid
		KAP.8	0.936	Valid
		KAP.9	0.952	Valid
Kepemimpinan adaptif	*Technical skill* (kemampuan teknis)	PIM.1	0.905	Valid
		PIM.2	0.913	Valid
		PIM.3	0.863	Valid
	Human skill (kemampuan bersifat manusiawi)	PIM.4	0.855	Valid
		PIM.5	0.818	Valid
		PIM.6	0.836	Valid
	Conceptual skill (kemampuan konseptual)	PIM.7	0.909	Valid
		PIM.8	0.936	Valid
		PIM.9	0.951	Valid
Strategi inovasi	Eksplorasi Peluang *(Opportunity Exploration)*	Y.1	0.851	Valid
		Y.2	0.828	Valid
		Y.3	0.733	Valid
	Mengeluarkan Ide *(Idea Generation)*	Y.4	0.874	Valid
		Y.5	0.876	Valid
		Y.6	0.842	Valid
	Memperjuangkan	Y.7	0.913	Valid
	(Championing)	Y.8	0.942	Valid
		Y.9	0.898	Valid
	Aplikasi *(Application)*	Y.10	0.831	Valid
		Y.11	0.919	Valid
		Y.12	0.810	Valid
Kinerja organisasi	Efektivitas dan Efisiensi	Z.1	0.865	Valid
		Z.2	0.897	Valid
		Z.3	0.899	Valid
	Otoritas dan Tanggung Jawab	Z.4	0.900	Valid
		Z.5	0.910	Valid
		Z.6	0.932	Valid
	Displin	Z.7	0.881	Valid
		Z.8	0.928	Valid
		Z.9	0.911	Valid
	Inisiatif	Z.10	0.707	Valid
		Z.11	0.702	Valid
		Z.12	0.940	Valid

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 1. diatas diperoleh nilai pada pengolahan data melalui SEM-PLS dengan hasil outer loading pada setiap indikator pada masing-masing variabel terdapat satu indikator (TEK.10) pada variabel teknologi yaitu terkait "dukungan fasilitas teknologi digital di Bidpropam Polda Bengkulu saat ini sudah memadai", yang dinyatakan tidak valid karena bernilai (<0,70) dan selebihnya instrument dinyatakan valid karena nilai convergent validity dari model pengukuran didapat dari korelasi antara skor item/ instrumen dengan skor konstruknya (loading factor) dengan kriteria nilai loading factor dari setiap instrumen> 0.7 (Hair et al, 2021). Agar memenuhi ketentuan pada uji validitas yang dipersyaratkan, yaitu lebih tinggi dari 0,7 maka dilakukan pengolahan data yang kedua dengan mengahapus/ mengeliminasi indikator (TEK.10) pada variabel teknologi dari model.

Penilaian discriminant validity telah menjadi prasyarat yang diterima secara umum untuk menganalisis hubungan antar variabel laten. Untuk pemodelan persamaan struktural berbasis varian, seperti kuadrat terkecil parsial, kriteria Fornell Larcker dan pemeriksaan cross-loading adalah pendekatan yang dominan untuk mengevaluasi validitas diskriminan. Discriminant validity

adalah tingkat diferensi suatu indikator dalam mengukur konstruk instrumen. Untuk menguji discriminant validity dapat dilakukan dengan pemeriksaan Cross Loading dan Fornell Larcker yaitu koefisien korelasi indikator terhadap konstruk asosiasinya dibandingkan dengan koefisien korelasi dengan konstruk lain, dimana nilai konstruk korelasi indikator harus lebih besar terhadap konstruk asosiasinya daripada konstruk lain. Nilai yang lebih besar tersebut mengindikasikan kecocokan suatu indikator untuk menjelaskan konstruk asosiasinya dibandingkan menjelaskan konstruk-konstruk yang lain. (Jorg Henseler et al., 2014). Hasil pengolahan data dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2. Uji Disriminant Validity

		(X2)	(Y)	(X3)	(X4)	(Z)	(X1)
Budaya Adaptif	**(X2)**	0.831					
Strategi Inovasi	**(Y)**	0.920	0.862				
Kapabilitas Organisasi	**(X3)**	0.925	0.915	0.885			
Pimpinan Adaptif	**(X4)**	0.938	0.944	0.918	0.888		
Kinerja Organisasi	**(Z)**	0.887	0.964	0.918	0.919	0.876	
Teknologi Digital	**(X1)**	0.913	0.876	0.918	0.906	0.868	0.825

Sumber: data diolah, 2023

Dari hasil tabel 2. menunjukkan bahwa nilai loading dari masing-masing item indikator terhadap konstruknya lebih besar daripada nilai cross loading. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua konstruk atau variabel laten sudah memiliki discriminant validity yang baik, dimana pada blok indikator konstruk tersebut lebih baik daripada indikator blok lainnya. Selanjutnya, validitas konvergen mempunyai makna bahwa seperangkat indikator mewakili satu variabel laten dan yang mendasari variabel laten tersebut. Nilai rata-rata varian yang diekstraksi (Average Variance Extracted/ AVE) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Uji Disriminant Validity

	Average variance extracted (AVE)
Budaya adaptif	0.691
Strategi Inovasi	0.742
Kapabilitas organisasi	0.784
Pimpinan adaptif	0.789
Kinerja organisasi	0.768
Teknologi digital	0.681

Sumber : data diolah, 2023.

Dari hasil tabel 3. di atas, menunjukkan bahwa nilai Average variance extracted (AVE) masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai outer loadings >0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator telah memenuhi convergent validity dan memiliki nilai yang tinggi. Nilai AVE setidak-tidaknya sebesar 0,5. Nilai ini menggambarkan validitas konvergen yang memadai yang mempunyai arti bahwa satu variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator-indikatornya dalam rata-rata (Ghozali, 2016). iasanya dalam penelitian digunakan batas loading factor sebesar 0,70. Suatu indikator dapat dinyatakan memenuhi convergent validity dan memiliki tingkat validitas yang tinggi ketika nilai outer loadings > 0,70 sedangkan nilai Average Variance Extracted (AVE) > 0,50 (Chin & Todd, 1995). Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian telah memenuhi convergent validity yang baik (Sekaran & Bougie, 2016).

Berdasarkan pada data faktor-faktor Setelah dilakukan tahap input analisis lingkungan internal dan eksternal. Serta tahap pencocokan dengan matriks SWOT, maka tahap selanjutnya yakni tahap keputusan dengan menggunakan QSPM. Teknik ini secara objektif mengindikasikan

alternatif strategi mana yang terbaik. QSPM menggunakan input dari tahap pertama dan pencocokan dari tahap kedua untuk menentukan secara objektif diantara alternatif strategi. Penentuan skor daya tarik dilakukan dengan diskusi dengan responden terpilih di Polda Bengkulu yaitu dengan mengamati setiap faktor tersebut apakah mempengaruhi terhadap pilihan strategi yang dibuat, dengan memberikan skor 1 (jika tidak memiliki daya tarik), 2 (jika daya tariknya rendah), 3 (jika daya tariknya sedang), dan 4 (jika daya tariknya tinggi). Kemudian alternatif strategi yang dihasilkan akan dimasukan ke dalam QSPM sebagi berikut:

Strategi 1 :Peningkatan sarana-prasarana dan media pendukung implementasi sistem aplikasi Dumas Propam Presisi.
Strategi 2 : Pengembangan Kompetensi SDM Bidpropam
Strategi 3 : Transformasi organisasi yang adaptif

Diperoleh strategi alternatif dengan Total Attractivess Score (TAS) masing-masing strategi yaitu:

1. Strategi 1 : Peningkatan sarana-prasarana dan media pendukung implementasi sistem aplikasi Dumas Propam Presisi.
2. Strategi 2 : Pengembangan Kompetensi SDM Bidpropam
3. Strategi 3 : Transformasi organisasi yang adaptif

Maka didapatkan score untuk QSPM adalah sebagai berikut :

1. Strategi Transformasi organisasi yang adaptif mendapat point tertinggi yaitu : 5,86.
2. Strategi Pengembangan Kompetensi SDM Bidpropam : 5,79 sebagai alternative kedua.
3. Strategi Peningkatan sarana-prasarana dan media pendukung implementasi sistem aplikasi Dumas Propam Presisi mendapat point 5,68 sebagai alternative ketiga.

Action program yang dpat dilakukan pada masing masing strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Strategi Transformasi Organisasi yang Adaptif
   Transformasi organisasi yang adaptif merupakan proses perubahan budaya manajemen yang harus dilakukan secara konferenhensif dan berkesinambungan oleh Bidpropam Polda Bengkulu mengikuti/ menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital di era vuca dan era revolusi industry 4.0, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pimpinan lebih aktif untuk menciptakan budaya organisasi yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan penerimaan terhadap perubahan.
   b. Fokus pada penghargaan terhadap gagasan baru dan memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengambil risiko yang terkendali dalam mencari solusi inovatif.
   c. Bangun kemitraan baik internal maupun eksternal, untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan pemahaman yang lebih baik.
   d. Lebih responsif terhadap isu-isu terbaru yang mempengaruhi sistem di Kepolisian.

2. Strategi Pengembangan Kompetensi SDM Bidpropam
   Strategi pengembangan Kompetensi SDM Bidpropam yang unggul di era digital akan mengoptimalkan inovasi Polri dalam implementasi aplikasi pengaduan masyarakat Propam Presisi dan mewujudkan pelayan publik yang terpercaya, antara lain :
   a. Berikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam pelayanan melalui sistem digital.

b. Bentuk tim kerja dari berbagai bidang keahlian, dalam upaya percepatan menemukan solusi yang inovatif dalam menghadapi kendala.
c. Identifikasi potensi masalah dalam implementasikan sistem teknologi dan lakukan pendekatan yang lebih proaktif dalam memberikan rekomendasi perbaikan.
d. Lakukan supervise, asistensi dan sosialisasi secara massif dan merata.

3. Strategi Peningkatan sarana-prasarana dan media pendukung implementasi sistem aplikasi Dumas Propam Presisi

   Strategi peningkatan sarana-prasarana dan media pendukung implementasi sistem aplikasi Dumas Propam Presisi akan memudahkan terbangunnya pelayanan digital yang efektif dan efisien, antara lain :

   a. Lakukan upaya peningkatan sarana-prasarana pendukung implementasi sistem digital mengikuti perkembangan teknologi.
   b. Gunakan teknologi media sosial yang berkembang dimasyarakat seperti SMS, Whatsapp dan sejenisnya, guna mempermudah dalam komunikasi dan pelayanan mendukung optimalisasi implementasi sistem yang ada agar efektif dan efisien.
   c. Lakukan koordinasi dalam rangka mewujudkan integrasi dalam pelayanan dan pengawasan internal.
   d. Menyusun SOP pelayanan Dumas dengan sistem digital.

KESIMPULAN

Teknologi Digital tidak berpengaruh signifikan pada inovasi. Hal ini terjadi karena implementasi sistem teknologi di Bidpropam Polda Bengkulu belum berjalan secara optimal karena dukungan fasilitas sarana-prasarana belum memenuhi standar perkembangan teknologi saat ini. Namun demikian upaya inovatif harus terus dilakukan agar program prioritas Kapolri dalam rangka pelayanan pengaduan masyarakat melalui sistem aplikasi Propam Presisi dapat berjalan sesuai harapan. Budaya Adaptif tidak berpengaruh signifikan terhadap inovasi. Hal ini terjadi karena masih adanya upaya menentang perubahan dan beradaptasi serta rendahnya keberanian SDM dalam organisasi untuk berinisiatif dan menghadapi resiko sehingga perlu peran pimpinan memberikan dukungan moriil kepada personel Bidpropam Polda Bengkulu untuk lebih aktif dan inovatif. Kapabilitas Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap inovasi. Hal ini terjadi karena dalam menempatkan personel belum memperhatikan standar dan kualitas SDM sehingga tidak ada inovasi dalam pelaksanaan pelayanan melalui sistem aplikasi Propam Presisi dan dengan segala keterbatasan system yang ada maka tidak dapat berjalan dengan optimal. Kepemimpinan adaptif berpengaruh signifikan terhadap inovasi. Unsur pimpinan di Bidpropam Polda Bengkulu sudah mampu adaptif di era vuca dan revolusi industry 4.0, namun demikian perlu dilakukan upaya yang lebih terstruktur lagi agar dapat diikuti oleh personel dibawahnya untuk mewujudkan kemampuan inovasi menghadapi berbagai kelemahan, masalah dan hambatan dalam upaya optimalisasi implementasi sistem yang dikembangan Polri seperti Dumas Propam Presisi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Afan. M. (2021). Perkuliahan Daring dan Luring Mata Kuliah Introduction To Cultural Studies. Mataram, Indonesia: Universitas Nahdlatul Wathan Mataram.
[2] Al-Farraby, R. (2021). Presiden: Penggunaan Kewenangan Polri Harus Didukung oleh Perkembangan Teknologi Mutakhir. Retrieved 4 June 2023, dari https://www.presidenri.go.id/ siaran-pers/presiden-penggunaan kewenang-an-polri-harus-

didukung-oleh-perkembangan-teknologi-mutakhir/
[3] Alma, & Arif. (2020). Adaptive Public Leadership: Tantangan Kepemimpinan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, VIII, Edisi 1, 15-28.
[4] Aspiranti, T. (2010). Manajemen budaya organisasi. Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa), 7, No. 1.
[5] Budaya Adaptif dalam Perusahaan, Yuk Kenali! | BINUS Online. (2022). Retrieved 4 June 2023, from: https://onlinelearning.binus.ac.id/2022/07/25/mengenal-budaya-adaptif-dalam-perusahaan/#:~:text=itu%20budaya%20adaptif%3F,Apa%20itu%20budaya%20adaptif%3F, proses%20perbaikan%20internal%20yang%20berkelanjutan.
[6] Chantica, J. A., Cahyani, R., & Romadhon, A. (2022). Peranan Manajemen Pengawasan: Komitmen, Perencanaan, Kemampuan Karyawan (Literature Review Msdm). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 3, 247-256.
[7] Danuri, M. (2019). Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital. Infokam, 116-122.
[8] David, F. R. (2015). Strategic Management. Florance, South Carolina: Pearson Education Limited.
[9] Faturahman, B. M. (2018). Kepemimpinan Dalam Budaya Organisasi. Madani Jurnal Politik dan Sosial Masyarakat, 10, No.1, 1-11.
[10] Hadi, S. (2020). Penguatan Pengawasan dalam Pelayanan Publik. Ombusdman Republik Indonesia, 1-2.
[11] Hamali, S., Hidayat, C., & Darman. (2017). Pengaruh Dimensi Inovasi Terhadap Kinerja Pemasaran Dan Keuangan Pada Industri Kecil Pakaian Rajutan Binong Jati Jawa Barat. Universitas Bina Nusantara Jakarta, 790-801.